

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan seseorang yang dapat terpenuhinya kebutuhan pokok, yang meliputi dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya terasa aman dan tentram, baik lahir ataupun batinnya.<sup>1</sup>

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga kesejahteraan setiap individu atau keluarga ukurannya berbeda, tetapi prinsipnya kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat dikatakan terpenuhi. Dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat merupakan hal tidak dapat terpisahkan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ekonomi dapat berhasil apabila kesejahteraan masyarakat tingkatnya semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan.<sup>2</sup>

Soetomo mengungkapkan indikator kesejahteraan terdapat tiga komponen yaitu pertama, keadilan sosial indikatornya terdiri dari pendidikan, akses pada kesehatan, akses listrik dan air, penduduk miskin. Kedua, keadilan ekonomi indikatornya terdiri dari pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan pendidikan. Ketiga, keadilan demokrasi indikatornya terdiri dari rasa aman dan akses informasi yang mudah.<sup>3</sup>

Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional sebagai alternatif. Kesejahteraan warga negara merupakan salah satu tujuan negara Indonesia, sebagaimana

---

<sup>1</sup> Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

<sup>2</sup> Bahrudin Rudy, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN, 2012).

<sup>3</sup> Mutia Sumarni, "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2020, 77–90, <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>.

tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945. Rencana pembangunan yang telah lama diupayakan merupakan sarana utama yang kemakmuran dapat terwujud.<sup>4</sup> Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat dan provinsi dibebaskan dari sebagian tanggung jawab mereka ketika daerah atau bahkan masing-masing desa diberi kebebasan untuk menetapkan prioritas kebijakan mereka sendiri, yang dapat berdampak besar pada kecepatan dan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat, meliputi penyadaran, kematangan ekonomi, dan politik masyarakat, sebagai warga negara yang lebih maju dapat dibina dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini dapat mempercepat realisasi tujuan pembangunan yang menjadi arah tindakan pemerintah pusat. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusannya sendiri dikenal sebagai "otonomi desa", dan ini dirancang untuk membantu kota menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk pertumbuhan dan kemakmuran.<sup>5</sup>

Otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika pemerintah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik, dan pembangunan desa berjalan dengan semestinya. Pembangunan desa merupakan pendekatan peningkatan masyarakat pedesaan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal desa, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan melalui pengelolaan pendapatan asli desa secara cermat, baik sebagai penambah pendapatan maupun sumber pendapatan baru. Kekayaan yang dimiliki desa dikelola untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup mereka sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 77, dan meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi desa. Menurut Permendagri No. 66 Tahun 2007 yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa, pemerintah daerah di desa tidak lagi harus mengikuti rencana pembangunan pemerintah pusat yang kaku, sehingga lebih leluasa dalam menentukan kecepatan dan sifat pertumbuhan desa. Harapan untuk melaksanakan otonomi yang lebih

---

<sup>4</sup> Hendri. w, "Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4 (2020).

<sup>5</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

besar dalam menjalankan bisnis pemerintah, khususnya pengelolaan moneter, dapat dicapai. Otonomi keuangan desa dicapai melalui pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mengelola keuangannya sendiri. Penting agar Desa tidak harus bergantung pada uang yang dikirimkan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran penting dan strategis dalam membantu pemerintah kota dan kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan desa, pemimpinnya perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang pengelolaan keuangan. Kemampuan pemerintah desa untuk memahami dan melaksanakan praktik pengelolaan yang baik sangat penting untuk keberhasilan desa secara keseluruhan. Ketika ada hambatan kemajuan suatu daerah, penting untuk memiliki rencana cadangan untuk paradigma pembangunan baru. Diperlukan suatu daerah otonom bagi desa agar dapat mengelola sumber pendanaan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pemukiman yang paling terpencil sekalipun.<sup>7</sup> Sebagian besar daratan Indonesia terdiri dari desa-desa, termasuk yang memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan pendapatan nasional. Desa ini memiliki banyak kemungkinan yang belum dimanfaatkan karena melimpahnya sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah desa harus segera melaksanakan rencana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli desa merupakan dua tujuan dari pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam desa. Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan kegiatan lain yang meningkatkan pendapatan asli desa, semuanya sah menggunakan dana pemerintah, dan sistem pemerintahan di desa berhak mengelola dana tersebut. Pendapatan asli desa, hibah pemerintah, dan pendapatan lain semuanya berkontribusi pada keuntungan desa, dan semuanya harus dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Kemandirian keuangan suatu desa tergantung pada kemampuannya mengolah kekayaan yang dimilikinya, dan hal ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan

---

<sup>6</sup> I Made Sara, Komang Adi Kurniawan Saputra, and Anak Agung Ketut Jayawarsa, "Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *ISEI Economic Review* 3, no. 2 (2019): 45–53, <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/109>.

<sup>7</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

keuangan yang matang. Jika pendapatan asli suatu desa lebih besar dari jumlah subsidi pemerintahnya, maka desa tersebut mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengelola kekayaan secara baik dan optimal, menurunkan beban ketergantungan terhadap dana anggaran keuangan pemerintah pusat sehingga desa dapat lebih mandiri.<sup>8</sup>

Indikator yang baik tentang seberapa baik kemajuan pemerintah desa adalah sejauh mana desa mampu menghasilkan pendapatan keuangannya sendiri. Tujuan rencana pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang apa itu desa dan untuk apa pemerintahan desa adalah sebagai sarana penyelenggaraan urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, dan pada ayat 3 pasal yang sama mendefinisikan pemerintahan desa sebagai kepala desa atau perangkat desa, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah desa diberdayakan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari dewan desa. Upaya yang dilakukan berupa strategi, yaitu implementasi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah desa, guna mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, dan upaya tersebut harus tepat sasaran. Strategi yang matang akan memperlancar terwujudnya keberhasilan.

Buzzel dan Gale menyatakan bahwa strategi adalah kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Sumberdaya yang dikeluarkan sangat penting dan sulit digantikannya mempengaruhi

---

<sup>8</sup> Rahmat Saleh, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 15, no. 2 (2020): 111–34.

<sup>9</sup> Agus Nurulshyam Suparman et al., "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran" 02 (2022): 2001–10, <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1109>.

keputusan dalam mengambil kebijakan.<sup>10</sup> Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya mewujudkan visi dan misinya, yang keduanya hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang matang. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pemerintah desa untuk pembangunan ekonomi sangat tergantung pada pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan asli desa. Pemerintah daerah harus menyusun rencana yang komprehensif dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Strategi pemerintah desa harus diarahkan pada tujuan yang tepat dan sejalan dengan harapan masyarakat. Strategi pemerintah desa adalah inisiatif untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan usaha yang dimiliki dan dioperasikan secara lokal yang memaksimalkan sumber daya desa dan memanfaatkan kekuatan unik warganya. Pendapatan asli desa dikelola untuk menghasilkan pendapatan dan tambahan pendapatan desa guna memajukan pembangunan dan kesejahteraan desa secara umum. Pendapatan asli desa adalah uang yang dibawa ke desa yang diciptakan secara lokal dan dengan bantuan masyarakat setempat. Tujuan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh suatu desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup umum di desa tersebut, serta untuk meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi penduduk desa tersebut.<sup>11</sup> Pendapatan yang dihasilkan oleh kewenangan desa atas dasar hak asal usul dan kewenangan desa setempat dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain bisnis, aset, gotong royong warga membantu warga, kerja sukarela, swadaya, dan bentuk dukungan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah menggunakan sebagian dari pendapatan asli desa sebagai modal investasi guna memperoleh dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli desa berupaya mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah.<sup>12</sup>

Mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah merupakan langkah awal desa menjadi mandiri. Tetapi masih terdapat adanya problematika dalam keuangan daerah. Pemerintah daerah harus segera mengatasi persoalan-persoalan umum dalam

---

<sup>10</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).

<sup>11</sup> Nur Cisan Imran Kurman, Dody Setyawan, and Noora Fithriana, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa," *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 3 (2021): 232–37, <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2361>.

<sup>12</sup> A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

keuangan daerah, seperti kecilnya kontribusi pendapatan asli desa yang tidak proporsional hingga besarnya kontribusi dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Menurut Riharjo, desa masih sangat bergantung pada penyediaan dana dari pemerintah karena kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan total penerimaan dana dari pemerintah kabupaten atau kota. Anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya terus meningkat, terlihat dari meningkatnya jumlah dana desa yang disalurkan setiap tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 belum berkurang secara signifikan. Lebih banyak fokus dan penekanan perlu ditempatkan pada ketergantungan pemerintah desa pada dana transfer pemerintah jika desa ingin menjadi mandiri.<sup>13</sup> Kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola pendapatan asli desa. Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan asli desa maka semakin besar pula desa untuk menggunakan pendapatan asli desa tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa strategi pengembangan organisasi perlu dilihat dengan pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Pentingnya penerapan strategi dalam pengelolaan pendapatan asli desa selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusifa tentang strategi pengelolaan pendapatan asli desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto bahwa strategi pengelolaan pendapatan asli desa sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses pengelolannya. Penelitian dengan hasil yang sama yaitu dilakukan oleh Saputra tentang pengelolaan pendapatan asli desa sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan, menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintah desa sudah sesuai dengan prosedur dan meningkatkan pendapatan asli desa sehingga pemerintah desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian desa.<sup>14</sup>

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Hermansyah tentang pengelolaan pendapatan asli desa oleh pemerintah desa dalam

---

<sup>13</sup> ernawati & Riharjo, "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah," *Ilmu Dan Reset Akuntansi* 6, no. 2 (2017): 531–45.

<sup>14</sup> Komang Adi Kurniawan Saputra et al., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>.

meningkatkan pembangunan desa di Kabupaten Ciamis yang secara umum dilakukan sudah cukup baik, tetapi belum dilakukan secara optimal dan adanya hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, penerimaan uang sewa, belum adanya regulasi penertiban aset desa, kurangnya partisipasi dari masyarakat, dan lemahnya pertanggungjawaban rencana kerja desa.<sup>15</sup> Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Yuliawati tentang pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Kawalimukti masih kurang optimal untuk meningkatkan pendapatan asli desa, hal ini masih terlihat adanya hambatan-hambatan.

Desa Banyuputih merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, yang memiliki luas wilayah 2,54 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 20 RT dan 5 RW. Desa Banyuputih didominasi oleh lahan persawahan dan perkebunan, serta dulunya sebagai desa sentra pengolahan susu kambing. Tetapi warga sekitar mayoritas mata pencahariannya sebagai wiraswasta dan buruh pabrik, mengingat sektor pertanian dan perkebunan seharusnya menjadi potensi desa saat ini dianggap kurang menjanjikan, seperti di daerah-daerah lain yang menganggap buruh pabrik dengan penghasilan UMR dan penghasilan tetap lebih diminati dari pada petani yang tidak jelas penghasilannya. Desa Banyuputih merupakan salah satu desa yang maju di Kecamatan Kalinyamatan, terbukti dari adanya beberapa pabrik. Salah satu pabrik terbesar di Jepara yaitu PT Hwaseung Indonesia atau PT HWI yang letaknya di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, merupakan perusahaan manufaktur sepatu yang memproduksi sepatu dengan merk Adidas, yang didirikan pada 19 April 2016. Pabrik ini salah satu pabrik yang sudah beroperasi cukup lama di Kabupaten Jepara, dengan kapasitas pabrik yang cukup besar dan luas mampu menampung ribuan karyawan baik pria ataupun wanita. Sekaligus memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) bagi Desa Banyuputih, Kepala Desa Banyuputih mengungkapkan senang dengan adanya pabrik, karena menjadikan wilayahnya menjadi daerah yang makmur, dan menaikkan taraf hidup warganya serta menjadi mata pencaharian masyarakat disekitarnya, terbukti hampir ada 160 rumah-rumah kost yang menjadi lokasi tinggal para karyawan, serta banyaknya transaksi jual beli disekitar wilayah Desa Banyuputih dan desa-desa lainnya,

---

<sup>15</sup> Nana Hermansah, Agus Nurulsyam, and Edi Siswadi, "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis," *Nana* 5 (2019): 288–93.

tentunya ini merupakan sumber perputaran uang yang cukup besar. Maka para pihak desa membangun kios-kios yang ekonomis sekaligus resrepresentatif untuk disewakan sebagai salah satu sumber pemasukan desa, serta ini bisa menjadi contoh desa mandiri di Kabupaten Jepara yang tidak bergantung pada Anggaran Dana Desa. Selain adanya kios juga terdapat pasar desa, yang letaknya di depan pabrik HWI, serta setiap jam istirahat pabrik HWI disekitar pasar dan kios-kios tersebut terjadi proses transaksi jual beli yang menguntungkan. Pasar dan kios-kios tersebut dibangun untuk sumber perputaran uang warga desa serta untuk menambah pemasukan desa.

Desa Banyuputih termasuk desa yang maju di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, tetapi tergolong maju tersebut pendapatan asli desanya masih rendah dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Desa Banyuputih merupakan salah satu daerah otonom yang padat penduduk, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka efektivitas pembangunan pada desa menjadi semakin besar, maka pemerintah desa perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk mengelola pendapatan asli desa secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, serta pengawasan. Apabila otonomi desa terselesaikan, maka tidak terjadi urbanisasi tenaga kerja menyerbu lapangan pekerjaan di perkotaan. Melihat potensi yang dimiliki Desa Banyuputih sangat besar baik dari segi sumber daya alam berupa pertanian, ladang, tanah kas desa, kios-kios, pasar desa dan pabrik ataupun sumber daya manusianya masyarakat menggeluti dunia perdagangan. Saat ini sumber-sumber pendapatan asli desa masih terdapat yang belum bisa dikelola secara optimal oleh desa.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, desa diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa secara optimal dengan memulai adanya perbaikan dan peningkatan sumber pendapatan asli desa, sehingga desa memerlukan strategi yang sesuai untuk menentukan arah perkembangan pendapatan desa yang berhasil dan tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Kemudian peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa Banyuputih Jepara pada tahun 2021- 2022”**

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengelolaan Pendapatan asli desa serta strategi apa saja yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menekankan pada Strategi Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa Banyuputih Kabupaten Jepara pada Tahun 2021- 2022.

## C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun rumusan masalah yang ingin dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada tahun 2021- 2022 ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada tahun 2021- 2022 ?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu:

1. Mengetahui Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Tahun 2021-2022.
2. Mengetahui kendala dalam pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada tahun 2021-2022

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan sumber ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan program studi ekonomi syariah dalam bidang Pemerintahan Desa melalui pendapatan asli desa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk membuat penelitian tentang pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

#### b. Manfaat Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan gambaran dalam proses pengelolaan pendapatan asli desa dan

untuk menjadi bahan masukan untuk menganalisa dan mengevaluasi terkait pengelolaan pendapatan asli desa.

## F. Sistematika Penelitian

Kegiatan penelitian penyusunan skripsi ini, peneliti mencoba merangkai dengan kerangka teratur yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari penelitian ini dari awal hingga akhir yang sesuai dengan buku panduan penelitian skripsi sebagai upaya memudahkan pembaca untuk memahami isi dari diadakannya penelitian ini. Adapun sistematikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Bagian Awal

Bagian awal penulisan pada penelitian ini, meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, penyertaan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.

### b. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu bab I sampai bab V yang saling berkaitan yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas terkait alasan atau hal-hal lain yang menjadi alasan pengambilan tema “Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi” yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika kepenelitian.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang kajian teori dari strategi pengelolaan pendapatan asli desa, peningkatan pembangunan ekonomi desa, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang diambil, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatann, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data yang berisi tentang strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian yang menjelaskan tentang

strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari pihak-pihak terkait penelitian tentang strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae penulis.

